

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah antara lain bank Muamalat, bank Mandiri Syariah, bank BRI Syariah, bank CIMB Niaga Syariah. Tak hanya itu, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) juga ikut mengalami perkembangan. Jumlah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) pada Tahun 2017 di seluruh Indonesia mencapai 4 ribuan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum islam tanpa adanya penerimaan dan pembayaran bunga.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) menerapkan pola bagi hasil dan melarang akan adanya penerimaan dan pembayaran bunga karena dalam Islam pembayaran bunga hukumnya haram. Seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangannya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurut Buchori (2012:15), koperasi syariah merupakan konversi

dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ta'awun (tolong-menolong) dan kekeluargaan. BMT dalam melaksanakan operasionalnya berlandaskan syariat Islam. BMT juga lahir dari kelompok masyarakat yang sepakat untuk mendirikan BMT.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan (Fahmi, 2012:21).

Laporan keuangan menurut SAK Syariah adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.

Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dilakukan sesuai dengan perkembangan fatwa DSN MUI dan dengan mempertimbangkan dinamika aktivitas ekonomi berbasis syariah, terutama aktivitas bisnis keuangan syariah. Standar akuntansi keuangan syariah mengatur transaksi berbasis syariah yang belum diakomodasi dalam standar akuntansi keuangan umum. Standar akuntansi keuangan syariah

melengkapi standar akuntansi keuangan umum dengan mengatur akuntansi untuk transaksi syariah.

Standar akuntansi keuangan syariah berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syariah.

Penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101 dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) PADA 27 Juni 2007. PSAK 101 menggantikan pengaturan mengenai penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah pada 25 Mei 2016.

Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi koperasi syariah sebagai entitas syariah adalah PSAK Syariah untuk transaksi syariah dan penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Hal ini dikarenakan entitas syariah termasuk BMT merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik

BMT yang bukan perusahaan terdaftar di pasar modal dan tidak memiliki akuntabilitas publik, tidak diwajibkan menyusun laporan keuangannya menggunakan SAK Umum. Untuk itu BMT membutuhkan Standar akuntansi keuangan yang memiliki pengaturan yang lebih

sederhana dari SAK Umum berbasis IFRS yaitu SAK ETAP (Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik).

ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator yang berwenang. Sejak diterbitkannya, SAK ETAP telah menjadi pilar kedua standar akuntansi keuangan di Indonesia.

BMT “X” Sidoarjo dirintis pada tanggal 3 Maret 2007. Pertimbangannya adalah pengembangan dan peningkatan amal usaha dan praktik sosial yang unggul dengan memperluas program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sebagai basis kekuatan kemandirian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian pada BMT “X” Sidoarjo yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP dan Syariah pada BMT “X” Sidoarjo”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penyajian laporan keuangan pada BMT “X” Sidoarjo berdasarkan SAK ETAP dan SAK Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BMT “X” Sidoarjo berdasarkan SAK ETAP dan SAK Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi oleh BMT dalam penyajian laporan keuangan

2. Bagi Universitas Muhammadiyah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik, penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini dibahas mengenai pendekatan penelitian, keterlibatan peneliti, prosedur pengumpulan data, dan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini dibahas mengenai gambaran umum subjek/obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut.

